

ABSTRAK

Whistleblower biasa disebut juga peniup peluit atau pengungkap fakta, istilah ini merujuk pada perannya sebagai saksi yang melaporkan adanya indikasi tindak pidana yang terorganisir di tempat dimana ia bekerja, serta dapat memiliki akses informasi yang memadai atas indikasi tindak pidana tersebut. Keberadaan *whistleblower* sangat penting guna penanggulangan tindak pidana yang terorganisir sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Maka dalam penulisan skripsi ini akan dibahas dua (2) rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan *whistleblower* dan bagaimana kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan seperti sinkronisasi pengaturan dan aparat penegak hukum guna memahami aspek praktik perlindungan *whistleblower*. Kemudian meski sudah ada beberapa pengaturan mengenai *whistleblower* akan tetapi, didalam KUHAP masih belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur dengan jelas dan pasti mengenai perlindungan dan kedudukan *whistleblower*. Hal-hal tersebut yang memiliki dampak masih kurang optimalnya perlindungan hukum bagi saksi pelapor atau *whistleblower*.

Di masa depan, kedudukan *whistleblower* diharapkan lebih diperhatikan baik oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum agar memiliki perlindungan yang lebih menyeluruh dalam setiap sektor, serta memberikannya penghargaan guna mengapresiasi atas keberaniaanya dalam mengungkapkan fakta dan berpihak pada keadilan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kedudukan, *Whistleblower*, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

ABSTRACT

Whistleblowers, commonly referred to as whistleblowers or fact revealers, are individuals who report indications of organized criminal activities within their workplace and have access to sufficient information regarding these criminal activities. The presence of whistleblowers is crucial for combating organized crime as part of the criminal justice system's objectives. This thesis will address two main issues: how whistleblowers are regulated and what their role is within the Indonesian criminal justice system.

The research method employed is juridical normative, with a descriptive analytical research specification, secondary data type, and qualitative data analysis method.

The findings of this thesis indicate that the position of whistleblowers within the Indonesian criminal justice system still requires adjustments, such as the synchronization of regulations and law enforcement agencies to understand the practical aspects of whistleblower protection. Although there are several regulations concerning whistleblowers, the Criminal Procedure Code (KUHAP) lacks specific and clear regulations regarding the protection and position of whistleblowers. These issues contribute to the suboptimal legal protection for reporting witnesses or whistleblowers.

In the future, the position of whistleblowers is expected to receive more attention from both the general public and law enforcement officers, ensuring more comprehensive protection in every sector. Additionally, providing them with recognition would serve as an appreciation for their courage in revealing the truth and standing up for justice.

Keywords: Juridical Review, Position, Whistleblower, Indonesian Criminal Justice System.